

Info



Kadin

www.kadin-indonesia.or.id

www.indonesia-chamber.or.id



Diterbitkan oleh Sekretariat Kadin Indonesia. Menara Kadin Indonesia Lt 29,
 Jl. HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Telp. (+62-21) 5274484 – 85 Fax. (+62-21) 5274331 – 32
 e-mail: infokadin@kadin-indonesia.or.id

PENGANTAR

Daftar Isi

- Diskusi Implementasi Peraturan UU Penanaman Modal hlm. 1
- Kadin Sulsel Jajaki Kerjasama Dengan Arab Saudi.....hlm. 3
- Perdagangan Indonesia Agustus 2007 Surplus US\$ 2,67 Miliar.....hlm. 4
- RI Jadi Basis Produksi Lampu Pijar Phillips..... hlm. 4
- Konsumsi Kopi Domestik Tumbuh.....hlm. 5
- Belgia Tawarkan Wallonia Sebagai Gerbang Masuk Ekspor RI ke UE.....hlm. 6
- Indonesia – Jerman Sepakati Kerjasama Bilateral.....hlm. 7
- Peraturan.....hlm. 8
- Pameran, Seminar, Konvensi.....hlm. 8

AGENDA KADIN INDONESIA

Tanggal	Acara	Tempat
27 – 28 November	Pameran Bursa Komponen	Hotel Bumi Karsa, Komplek Bidakara.Jakarta
6 Desember	Seminar BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)	Hotel Borobudur
10 – 11 Desember	Int'l Biofuel Conference	Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali

ANEKA KEGIATAN

Diskusi Implementasi Peraturan UU Penanaman Modal

Pertemuan yang digagas oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) ini terkait permasalahan implementasi peraturan sebagai penjelasan dari UU Penanaman Modal No. 25/2007. Diskusi yang dilangsungkan pada hari Senin, 01 Oktober 2007 dihadiri lebih dari 30 orang perwakilan asosiasi dan institusi bisnis. Kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana sebaiknya pelaksanaan dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu (*one stop shop*) di bidang penanaman modal.

Pertanyaan mendasar yang sering mereka lontarkan adalah "Perluakah kita dihadapkan dengan peraturan lainnya?"

Keinginan pemerintah untuk menyediakan peraturan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan satu pintu di bidang penanaman modal guna mereduksi permasalahan dalam memulai usaha di Indonesia patutlah dihargai dan merupakan sebuah langkah maju diantara permasalahan perbaikan infrastruktur, pasokan energi dan ketidaklengkapan industri pendukung. Belum lagi permasalahan kepastian pajak, tenaga kerja dan perbaikan iklim investasi.

Pelayanan satu pintu diharapkan menjadi sebuah pelayanan yang dapat membatasi banyaknya aturan dalam memulai usaha sekaligus mempermudah pelayanan. Namun perlu diperhatikan lebih lanjut, dengan dikeluarkannya UU Otonomi Daerah No 32/2004, perlu adanya upaya sinkronisasi peraturan yang berada di pusat maupun di daerah, serta melihat seberapa efisienkah peraturan yang nantinya akan dibentuk ini.

Pembentukan pelayanan satu pintu memerlukan beberapa proses, mengingat pelayanan ini harus juga mempertimbangkan

segala persyaratan teknis dan non teknis yang menyertai dikeluarkannya sebuah perizinan.

Selain mendiskusikan rancangan peraturan pelaksanaan pelayanan satu pintu, pertemuan juga mendiskusikan substansi Peraturan Presiden No. 90/2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengingat BKPM dalam rancangan peraturan pelaksanaan merupakan institusi yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan.

Indonesia yang telah berhasil beranjak ke peringkat 123 dari 135 berdasarkan survey global tahunan atas lingkungan perundangan untuk berbisnis di 178 negara yang diadakan oleh Worldbank dan IFC patutlah membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar peningkatan investasi yang pada semester I-2007 baru mencapai Rp 28,37 triliun untuk realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp 36,90 triliun untuk penanaman modal asing (PMA).

Pertemuan diakhiri dengan disepakatinya pembentukan panitia kerja (*Working Group*) yang bertugas untuk mengumpulkan pandangan lebih lanjut terkait pembahasan rancangan peraturan implementasi pelayanan satu pintu dan UU No 90/2007 tentang BKPM, yang rencananya akan diberikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia tertanggal 8 Oktober 2007. (lh)

Workshop Direktur Eksekutif Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi 2007 (Wilayah Barat)

Pada tanggal 29-31 Oktober 2007 lalu, Kadin Indonesia bekerjasama dengan Kadin Provinsi Jawa Barat dan DIHK (Kadin Jerman) melaksanakan Workshop Direktur Eksekutif Tahun 2007 untuk Wilayah Barat yang diselenggarakan di Grand Setia Budi Bandung. Workshop bertemakan "*Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Layanan Dalam Rangka Peningkatan*

Jumlah Anggota Kadin" diikuti 36 peserta mewakili 17 Kadin Provinsi.

Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Kadin, perkuatan organisasi Kadin dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sekretariat Kadin Provinsi. Workshop 3 hari tersebut terdiri dari 6 sesi yang meliputi 16 materi. Materi-materi tersebut meliputi Informasi dunia usaha, Informasi peraturan perundang-undangan baru berkaitan dengan dunia usaha, Layanan Kadin, Sistem informasi dan Kesekretariatan.

Untuk selanjutnya Workshop Direktur Eksekutif Wilayah Timur akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 Nopember 2007 di Makasar dengan tema yang sama.

Indeks 'Kemudahan Berbisnis' di Indonesia Meningkat

Peringkat Indonesia dalam indeks "kemudahan berbisnis" International Finance Corporation (IFC) meningkat, yang mencerminkan kemajuan pemerintah dalam menetapkan pembaruan pengaturan, kata unit usaha investasi Bank Dunia, Rabu.

Dalam laporan IFC tentang "Doing Business 2008", Indonesia berada di peringkat 123 dari 178 negara yang disurvei. Tahun lalu, Indonesia berada di posisi 135 dari 175 negara yang disurvei dan pada

2005, negara itu berada di peringkat 115 dari 155 negara yang disurvei.

"Indonesia, pelaku pembaruan kedua di kawasan, telah mempermudah proses untuk mendapatkan izin konstruksi, dengan memangkas waktu memperoleh izin dari 49 hari menjadi 21," kata IFC dalam sebuah pernyataan.



Pengukuhan Pengurus Baru Kadin Indonesia Komite Amerika Serikat (KIKAS) oleh Ketua Umum Kadin Indonesia (30/8/2007)

"Indonesia juga memperluas cakupan pinjaman oleh badan terdaftar kredit publik dan memperkuat perlindungan investor dengan meningkatkan persyaratan keterbukaan," katanya. Peningkatan itu berdasarkan 10 indikator regulasi bisnis yang menjejak waktu dan biaya untuk memenuhi persyaratan pemerintah dalam memulai bisnis, operasi, perdagangan, perpajakan, dan *closure*. Mereka tidak mencerminkan area tertentu seperti kebijaksanaan ekonomi makro, mutu infrastruktur, volatilitas mata uang, persepsi investor, atau tingkat kejahatan.

IFC mengatakan pelaku pembaruan teratas di kawasan dan di antara 10 teratas di dunia adalah China menyusul dikeluarkannya hak milik perlindungan pribadi dengan jangkauan jauh dan undang-undang kebangkrutan baru. Singapura, untuk dua tahun berjalan, menduduki peringkat agregat teratas dari 178 perekonomian dalam kemudahan berbisnis.

Jumlah hari untuk memulai bisnis di Indonesia telah bertambah menjadi 105 hari dari 97 hari, namun masih lebih baik dari 2005, ketika itu membutuhkan 151 hari, menurut laporan itu.

Jumlah prosedur yang harus dilalui sebelum mendapatkan izin bisnis tetap 19, kata IFC. Namun, jumlah hari untuk mendaftarkan kepemilikan kini dapat dilakukan hanya tujuh hari, dibandingkan sebelumnya yang 42 hari.

Di tempat lain seperti di Australia, memulai bisnis hanya membutuhkan dua hari dengan dua prosedur, 35 hari di China dengan 13 prosedur, lima hari di Singapura dengan lima prosedur, 24 hari di Malaysia dengan sembilan prosedur dan 50 hari di Vietnam dengan 11 prosedur.

KADIN DAERAH

Kadin Sulsel Jajaki Kerja Sama Dengan Arab Saudi

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan H Syahrul Yasin Limpo bersama Wakil Ketua DPD Kadin Sulsel, Safari Azis Husain dan sejumlah pengurus Kadin Makassar, berangkat menuju Mekah - Arab Saudi untuk memenuhi undangan pengusaha negara tersebut yang tergabung dalam Kadin setempat (29/9/07). Rombongan ini dijadwalkan akan bertemu dengan pengurus Kadin Mekah pada hari Senin (1/10/07).

"Saya hanya memenuhi undangan pengurus Kadin Mekah, sedangkan menyangkut materi pertemuan kedua institusi yang menghimpun para pengusaha dari dua negara tersebut juga belum diketahui kecuali menyangkut informasi atau konsultasi perdagangan dan Maktaf Muazzasah yang akan dibahas disana," katanya, Sabtu.



Roundtable Discussion yang bertema "Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia", Ketua Umum Kadin didampingi Halim Kalla dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. (Banjarmasin, 22/8/07)

PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Krakatau Steel Aliansi Dengan Perusahaan Baja Global

PT Krakatau Steel (persero) akan menjalin aliansi strategis dengan empat perusahaan baja global untuk mengantisipasi terjadinya volatilitas harga baja yang sangat cepat, sekaligus mengamankan pasokan bahan baku bijih besi di dalam negeri.

Keempat perusahaan global tersebut antara lain Essar Steel Ltd, perusahaan baja India berkapasitas 8 juta ton per tahun, Bao Steel (perusahaan baja 10 besar dunia), Ispat Ltd (India), dan Nanjing and Iron Steel Co Ltd (China).

Niat serius PT Krakatau Steel (KS) tersebut segera difinalisasikan pada tahun depan, atau sebelum dilakukan penawaran saham perdana (IPO/initial public offering) pada 2009.

Selain empat perusahaan itu, KS juga akan beraliansi dengan perusahaan baja domestik. Aliansi ini juga bertujuan memperkuat nilai

perusahaan sebelum diprivatisasi," kata Dirut KS Daenulhay di sela-sela kunjungan pabrik baja, di Cilegon, kemarin.

Pergerakan harga baja di milenium kedua ini, katanya, sangat dinamis karena didorong lonjakan konsumsi dunia, sehingga memicu percepatan fluktuasi harga baja HRC (baja canai panas/hot rolled coils). Jika besarnya konsumsi tak diimbangi pasokan bahan baku yang cukup, eksistensi industri baja dalam negeri akan terganggu.

Karena itu, paparnya, perseroan segera mengambil langkah untuk beraliansi agar posisi KS sebagai produsen baja terbesar di Asean tidak terganggu. Saat ini, kekuatan-kekuatan baru industri baja Asean mulai tumbuh.

Mega Steel milik Malaysia, ungkapnya, sedang membangun electro galvanized, Yung Kong Steel (Thailand) tengah merampungkan Cold Rolling Mills, Group Lion sedang mendirikan direct reduction iron (DRI/mesin pengolahan pellet).

Belakangan, Vietnam akan membangun electric up-furnace berkapasitas 500.000 ton. Sementara itu, perusahaan-perusahaan baja China juga beraliansi dengan Australia untuk menjamin pasokan bahan baku.

"Indikasi ini membuktikan industri baja ke depan sangat prospektif. Untuk itu, KS harus segera beraliansi untuk mewujudkan target produksi 20 juta ton pada 2020," ujarnya. Sebagai strategi awal, KS mulai melakukan kajian restrukturisasi komprehensif atas kondisi perusahaan dan alat-alat produksi a.l. proyek gasifikasi batu bara, pembangkit listrik berbahan bakar gas untuk menunjang produksi flat dan long product.

Perdagangan Indonesia Agustus 2007 Surplus US\$2,76 Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2007 Indonesia masih mengalami surplus perdagangan sebesar 2,76 miliar dolar AS, dan secara kumulatif (Januari-Agustus) senilai 26,53 miliar dolar AS, meski terjadi penurunan ekspor sebanyak 2,11 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sementara impor naik 9,38 persen.

Kepala BPS, Rusman Heriawan, di Jakarta, Senin, mencatat ekspor pada Agustus mencapai 9,61 miliar dolar AS dan ekspor selama delapan bulan pertama 2007 mencapai 73,35 miliar dolar AS. Sedangkan impor pada Agustus mencapai

6,85 miliar dolar AS, dan impor selama delapan bulan pertama 2007 mencapai 46,82 miliar dolar AS.

RI Jadi Basis Produksi Lampu Pijar Phillips

Dalam kesempatan kunjungan kerja Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel ke pabrik lampu Phillips di Sidoarjo, produsen lampu asal Belanda ini ingin menjadikan Indonesia sebagai basis produksi lampu pijar dan neon terbaiknya di dunia dengan produksi mencapai ratusan juta lampu per tahun.

Hal ini dikemukakan Rob Fletcher (Presdir PT Philips Indonesia) di Surabaya (27/09/07), "Pabrik lampu Philips di Indonesia merupakan tempat belajar bagi karyawan lampu Philips lainnya di berbagai negara. Pabrik ini termasuk yang terbaik yang kami miliki," ujarnya.

Rob mengatakan setiap tahun pabrik tersebut memproduksi ratusan juta lampu pijar (bohlam) dan TL (neon) yang diekspor ke berbagai negara di dunia, baik di kawasan Eropa, Amerika, maupun Asia.

Philips menargetkan produksi lampu TL mencapai sekitar 46 juta unit tahun ini. Sedangkan produksi lampu pijar lebih besar lagi, karena satu mesin yang berkecepatan rendah saja produksinya mencapai 2.000 lampu per jam dan mesin berkecepatan tinggi mencapai sekitar 4.000 per jam. Pabrik sendiri beroperasi 24 jam. Selain di Indonesia, Philips juga memiliki pabrik sejenis di Polandia, serta pabrik lampu hemat energi (LHE) di China yang dijadikan basis produksi di dunia.

"Selain produksi lampu, kami juga memproduksi gelas lampu yang tidak hanya dipasok untuk kebutuhan sendiri, tapi juga produsen lampu lainnya," ujar Rob.

Oleh karena itu, gangguan pasokan gas atau listrik yang tidak stabil memberi ketidakpastian dalam pengiriman, yang dikhawatirkan menyebabkan Kantor Pusat Philips berpikir ulang untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.

Diakui Rob, masalah belum baiknya infrastruktur energi di Indonesia itu pula yang menyebabkan pihaknya sampai saat ini belum rencana membuat produksi LHE di Indonesia meskipun pasarnya terus meningkat.

"Pasti kami akan menambah investasi di sini, namun berbagai masalah yang dihadapi seperti

infrastruktur, imigrasi, dan kepabeanaan, harus diperbaiki dulu," katanya menanggapi pertanyaan mengapa Philips tidak membangun pabrik LHE di Indonesia, setidaknya mulai dari merakit terlebih dahulu.

Rob mengatakan pihaknya tidak ingin hanya membangun perakitan LHE dan tidak ingin mengikuti sejumlah perusahaan LHE yang kini banyak tumbuh di Indonesia dengan membangun perakitan LHE yang komponennya sebagian diimpor dari Cina.

"Kami tidak ingin seperti itu. Buat Kami pasar terbuka malah lebih baik, sehingga bisa bersaing secara sehat. Kami berkeyakinan memberikan produk yang baik pasti akan disukai konsumen," katanya

Chips Tapioka Potensial Gerakkan Ekonomi Kecil

Pemerintah Indonesia diminta untuk mendorong ekspor chip tapioka ke pasar China yang membutuhkan sedikitnya 5 juta ton per tahun.

Ketua Dekopin Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Benny A. Kusbini mengatakan sekitar 70% kebutuhan tapioka chip dipenuhi dari Thailand, sedangkan Indonesia saat ini baru memasok 140.000 ton. "Pasarnya tumbuh sekitar 15%. Kenapa pemerintah Indonesia tak berusaha memenuhi pasar tersebut?," ujar Benny kepada Bisnis dari Beijing.

Permintaan tapioka chips China tersebut merupakan peluang bagi Indonesia untuk menggerakkan industri kecil di dalam negeri, mengingat potensi bahan baku cukup berlimpah. Bila hal itu terealisasi, kata Benny, maka akan terbuka lapangan kerja di on-farm maupun off farm. "Perlu direbut peluang pasar tersebut," ujar Benny.

Brokoli, Prospektif Di Ekspor Ke Jepang

Suryo Pranoto, Presdir PT. Wahana Grahamakmur, mengungkapkan bahwa perusahaannya mampu mengekspor brokoli ke Jepang sekitar 10-20 ton per bulan karena prospeknya relatif bagus.

"Prospek ekspor brokoli ke Jepang terbuka lebar karena China sebagai saingan dibatasi eksportnya karena diduga mengandung pestisida," ujarnya kepada Bisnis di Medan pekan lalu.

Konsumsi Kopi Domestik Tumbuh

Tingkat konsumsi kopi domestik kini menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring dengan berkembangnya kafe yang telah memodifikasi cara penyajian kopi sebagai minuman.

"Konsumsi lokal sekarang tumbuh karena banyaknya kafe yang memodifikasi cara penyajian. Bahkan, di Jatim saja dari 11 perusahaan besar mampu menyerap antara 25.000-30.000 ton setahun," kata Sekretaris Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Jatim, Ichwan Nursidik, kemarin.

Menurut dia, tumbuhnya konsumsi domestik tersebut akhirnya juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan untuk pasar ekspor. Permintaan pasar ekspor cukup tinggi, di antaranya diindikasikan dengan tingginya harga kopi di pasar dunia ataupun di pasar lokal.

Harga kopi robusta di pasar London misalnya, untuk penyerahan November 2007 mencapai US\$2.334 per ton, sedangkan harga di tingkat petani di Jatim mencapai Rp17.000 per kilogram. "Itu pun barangnya sekarang tidak ada," katanya.

Harga kopi robusta di pasar London misalnya, untuk penyerahan November 2007 mencapai US\$2.334 per ton, sedangkan harga di tingkat petani di Jatim mencapai Rp17.000 per kilogram. "Itu pun barangnya sekarang tidak ada," katanya.

Sementara itu, Departemen Pertanian siap mengupayakan peningkatan produksi kopi dalam negeri, terutama jenis Arabika, dengan menaikkan produktivitas dari 560 kg per hektar (ha) menjadi sekitar 700-800 kg/ha.

Selama ini Indonesia lebih banyak mengembangkan kopi jenis Robusta dengan luas areal mencapai 1,17 juta ha dan produksi mencapai 596 ribu ton per tahun. Sedangkan lahan perkebunan kopi jenis Arabika yang banyak diusahakan di dataran tinggi secara nasional hanya seluas 101.867 ha dengan produksi sekitar 61.251 ton.

Pengembangan kopi Arabika tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali. Sedangkan untuk jenis Robusta, yang lebih lebih sesuai dikembangkan di dataran rendah banyak terdapat terutama di provinsi Lampung dan Pulau Jawa.

LUAR NEGERI

Belgia Tawarkan Wallonia Sebagai Gerbang Masuk Ekspor RI ke UE

Belgia menawarkan alternatif gerbang masuk ekspor Indonesia menuju Uni Eropa (UE) melalui negara bagian

(region) Wallonia, di Belgia selatan, sejalan dengan makin kuatnya kinerja perdagangan dan ekonomi Indonesia-Eropa.

Komisioner Perdagangan Belgia untuk negara-negara Asean, Philippe Delcourt pada jumpa pers di Jakarta, Senin,

mengatakan, terdapat beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh negara bagian Wallonia.

Antara lain, adanya pelabuhan sungai Liege -- pelabuhan sungai kedua terbesar di Eropa -- yang menyediakan jalur langsung ke Pelabuhan Antwerp dan Deebbrugge (keduanya di Belgia) dan Rotterdam (Belanda).

Selain itu, terdapat bandara internasional Liege yang beroperasi selama 24 jam dengan *landing fee* yang sangat kompetitif, tidak ada tarif khusus untuk pendaratan kargo pada malam hari, serta layanan bandara yang diklaim sebagai salah satu terbaik di Eropa.

"Karena posisi geografisnya yang strategis di Eropa, maka melalui negara bagian Wallonia, distribusi barang dapat dengan cepat menjangkau hampir 65 persen pasar Uni Eropa," kata Delcourt.

Selain menawarkan Wallonia sebagai gerbang masuk ekspor Indonesia ke Eropa, dia juga mengharapkan para pengusaha Indonesia mau menanamkan investasinya di negara bagian tersebut.

"Produk elektronika dan mebel Indonesia telah memiliki jaringan pasar yang bagus di Eropa, jadi lebih baik sekalian menanamkan modalnya di Wallonia," kata dia.

Terdapat beberapa insentif pengurangan pajak yang diberikan Pemerintah Belgia kepada para investor asing, dihitung berdasarkan harga pembelian lahan, bangunan, serta investasi aset tak berwujud ("intangible asset investment").



Suasana Diskusi pada Acara Buka Puasa Bersama Kadin di kediaman Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat. Hadir sebagai undangan diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kesra Aburizal Bakrie, dan Meneg BUMN Sofjan Djalil. (30/9/07)

Dia mengatakan, negara bagian Wallonia memiliki keunggulan tersendiri sebagai gerbang masuk bagi ekspor Indonesia ke Eropa dibanding dengan Pelabuhan Rotterdam, Belanda, yang secara tradisional

selama puluhan tahun menjadi tempat berlabuh komoditas ekspor Indonesia ke benua tersebut.

Menurut dia, harga lahan di Rotterdam saat ini sangat tinggi, yakni sekitar 400 euro per meter persegi ditambah dengan adanya kepadatan arus ekspor-impor di pelabuhan itu yang membuat eksportir ke pasar Eropa mencari alternatif pintu masuk lain, termasuk Wallonia.

Hal senada dikemukakan Dubes Belgia untuk Indonesia, Marc Trenteseau yang mengatakan untuk negara bagian Flandria (Vlaams) yang berada di Belgia utara, pintu masuk ekspor melalui Pelabuhan Antwerpen juga telah padat, sama seperti halnya Pelabuhan Rotterdam, Belanda. Karena itu, kata dia, Wallonia merupakan alternatif terbaik bagi eksportir Indonesia.

"Dari Wallonia Anda dapat mencapai London, Paris, Frankfurt dan Amsterdam dalam jarak hanya 400 kilometer," kata dia. Data Kedubes Belgia menyebutkan hingga akhir 2006 ekspor Indonesia ke Belgia sebesar 600 juta euro sementara ekspor Belgia ke Indonesia hanya sebesar 300 juta euro.

Sementara itu, data Eurostat hingga Desember 2005 ekspor Indonesia ke Uni Eropa (periode Januari-Oktober 2005) mencapai 8,8 miliar euro, sementara ekspor Uni Eropa ke Indonesia sebesar 3,7 miliar euro. Dari 10 komoditas ekspor utama Indonesia ke Eropa, terdapat empat komoditas yang mengalami kenaikan ekspor, yakni mebel (furniture) dengan nilai ekspor 740,29 juta euro atau naik 2,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya, kayu dengan nilai ekspor 583,19 juta euro (naik 9,3 persen), produk alas kaki dengan nilai ekspor 435,82 juta euro (naik 2,8 persen), serta karet dengan nilai ekspor 410,59 juta euro (naik 15,6 persen).

ASEAN –Korsel Sepakati FTA Di Bidang Jasa

Korea Selatan dan negara-negara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mencapai kesepakatan di bidang jasa, kata Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan di Seoul, Senin. Kesepakatan ini akan meningkatkan harapan bagi dicapainya kesepakatan perdagangan bebas (FTA) yang komprehensif pada akhir tahun ini.

Ekonomi terbesar ketiga di Asia dan sembilan dari 10 negara ASEAN itu telah berunding guna menyelesaikan perundingan perdagangan bebas di bidang jasa dan penanaman modal pada 31 Desember.

Kesepakatan di bidang jasa ini disetujui dalam pembicaraan dengan ASEAN di Laos pekan lalu, kata kementerian tersebut di dalam pernyataannya, seperti dilaporkan AFP.

Pada Juni tahun ini, kesepakatan perdagangan bebas mengenai jenis barang dagangan telah dibahas. Perjanjian sepenuhnya yang diusulkan terdiri atas kesepakatan di bidang jenis barang dagangan, jasa, investasi dan penyelesaian masalah-masalah sengketa.

Thailand menghapus kesepakatan jenis barang dagangan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan mengenai usulan pembukaan pasar

beras. Namun hal itu dikembalikan ke meja perundingan dengan Korea Selatan April lalu, kata kementerian tersebut. Perdagangan Korea Selatan dengan ASEAN, adalah mitra perdagangan kelima terbesar, mencapai nilai 53,5 miliar dolar pada 2005.

Indonesia – Jerman Sepakati Kerjasama Bilateral

Pemerintah Jerman sepakat memberikan bantuan kerjasama pembangunan bilateral kepada Pemerintah Indonesia sebesar 86 juta Euro. Dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan Dr Klemens van de Sand dibahas prioritas kerjasama bilateral yang akan dimulai tahun 2008, selain itu dibahas peninjauan kembali proyek proyek yang sedang berjalan dan juga komitmen baru bantuan Jerman kepada Indonesia.

Menurut Ibran Situmorang (Sekretaris III KBRI Berlin), pembicaraan itu juga menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dituangkan dalam "Summary Record on the Negotiations on Development Cooperation between the Government of the Indonesia and The Government of the Federal Republic of Germany."

Ibrani mengatakan dalam pertemuan itu juga disepakati bidang prioritas kerjasama bilateral diantaranya perubahan iklim, pemberdayaan sektor swasta, desentralisasi dan "Good Governance".

Sementara dua bidang prioritas sebelumnya yaitu kesehatan dan transportasi menurut rencana akan dihapus secara bertahap sampai proyek yang sudah disetujui sebelumnya selesai dilaksanakan.

Dalam kesepakatan kedua negara selain tiga bidang prioritas juga terbuka kemungkinan dukungan terhadap bidang spesifik lainnya dengan mempertimbangkan kasus per kasus, ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga disepakati jumlah komitmen baru bantuan kerjasama pembangunan pemerintah Jerman-Indonesia yang mencapai 86 juta Euro yang terdiri atas 77,5 juta Euro hasil kesepakatan sebelumnya dan sebesar 8,5 juta Euro dana hibah dan kerjasama teknik yang telah disepakati Maret lalu.

Dalam rangka kerjasama keuangan itu Pemerintah Jerman juga telah menyepakasi dana sebesar 55 juta Euro berupa pinjaman lunak dan

hibah, sedangkan kerjasama teknik jumlahnya yang telah disepakati sebesar 31 juta Euro.

Hasil komitmen yang disetujui pada perundingan RI- Jerman tahun 2005 lalu telah terjadi peningkatan untuk komitmen periode 2007-08 sebesar 10 juta. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dari Jerman kepada Indonesia, demikian Ibrani Situmorang.

PERATURAN

Peraturan Menteri No 78 tahun 2007 tentang peningkatan efektifitas pengembangan IKM dengan pendekatan 1 desa 1 produk (one village one product/OVOP)

Peraturan menteri ini dikeluarkan untuk efisien pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), Menteri Perindustrian mengeluarkan. Permen ini merupakan pelaksanaan Inpres No 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Strategi pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat lokal. Perpaduan program ini mencakup fasilitasi di bidang teknologi, standarisasi dan mutu produk, promosi dan pemasaran, pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan website. Konsep IKM Satu Desa Satu Produk Mulai Efektif 2008

1.406 Perda Harus Dibatalkan

Pemerintah merekomendasikan pembatalan terhadap 1.406 peraturan daerah (Perda) terkait investasi dari sekitar 6.000 Perda yang ditinjau. "Itu yang menyangkut investasi, masih banyak lagi Perda yang akan direview," kata staf ahli Menteri Koordinator Perekonomian, Jannes

Hutagalung usai sosialisasi pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6/2007 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sebagian besar Perda yang dibatalkan berasal dari pemerintah daerah yang berada di pulau Jawa. "Paling banyak perda kan di Jawa," ujarnya

Dari 6.000 perda yang direview tersebut, sebanyak 4.112 Perda dinyatakan layak untuk diterapkan, sedangkan 201 Perda direkomendasikan untuk direvisi.

PAMERAN, SEMINAR, KONVENSI

Bursa Komponen 2007 / Reverse & Part Exhibition

Merupakan pameran yang menjadi agenda tahunan dari Kadin Indonesia bid. Industri, Kelautan, & Maritim. Akan diselenggarakan pada 27-28 November 2007 di Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jln. Gatot Subroto Kav.71-73. Jakarta.

Informasi lebih lanjut mengenai kepesertaan dapat menghubungi Go Ad - PT. Elmapuri Gopita, Telp. 830 3867, 830 5647, 835 5312 U.P : Sdri. Dewi Anggraeni.

MTT 2008 / Metal Technology & Tools 2008

Diselenggarakan oleh gabungan asosiasi industri metal maupun industri komponen otomotif. Akan digelar pada 27 – 30 Agustus 2008 di Jakarta International Expo- Kemayoran, Jakarta - Indonesia (PRJ).

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bpk. Indra Putra, telp: +62 21 266 45464, faks: +62 21 266 45485, email: jkt@ecm-intl.com.

Dyviacom
IT Infrastructure & Connection

Diterbitkan oleh: Sekretariat Kadin Indonesia. **Pelindung:** M.S.Hidayat (*Ketua Umum Kadin Indonesia*) Adi Putra Tahir (*Wakil Ketua Umum Keorganisasian dan Keanggotaan*) **Penanggung Jawab:** Hariadi Saptadji,

Dewan Redaksi: Para Direktur dan Kepala Biro Kadin Indonesia

Pemimpin Redaksi: Sutrisno ; **Wakil Pemimpin Redaksi/ Pelaksana Teknis:** Hadi Widiyanto. Telp: 5274484 ext.111

Kontributor: Miftahul Hakim, Ruwiyati Sri Rahayu, Nursyamsi Gemawaty